

Tantangan Implementasi *ASEAN Community*: Kasus di Kota Malang

Najamuddin Khairur Rijal

Abstract

This paper examines the challenges of implementing the ASEAN Community that are elaborated based on the understanding and views of the management of International Relations Students Association in Malang. The data used is the primary data obtained from the results of structured interviews and questionnaires to 60 respondents. While secondary data is used to support the discussion. As the result, there are three challenges of implementing the ASEAN Community. First, the understanding of society related to the description of the characteristics/goals of each pillars of ASEAN Community is low. The second challenge is people are more familiar with the term of MEA, so there are reduction of understanding about ASEAN Community is limited to the economic dimension. Third, the lack of understanding and the reduction of understanding is inseparable from the source of information about ASEAN Community which originated more dominant from secondary information.

Keywords: ASEAN Community, AEC, Malang City

Abstrak

Tulisan ini mengkaji mengenai tantangan implementasi ASEAN Community yang dielaborasi berdasarkan pengetahuan dan pandangan mahasiswa pengurus Himahi di Kota Malang. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terstruktur dan pengisian angket kepada 60 responden. Adapun data sekunder digunakan untuk mendukung uraian pembahasan. Hasil penelitian menemukan bahwa ada tiga tantangan dalam implementasi ASEAN Community. Pertama, pemahaman masyarakat masih rendah terutama berkaitan dengan penjabaran dari karakteristik/tujuan masing-masing pilar ASEAN Community. Tantangan kedua adalah masyarakat lebih familiar dengan istilah MEA sehingga terjadi reduksi pemahaman tentang ASEAN Community hanya sebatas pada dimensi ekonomi. Ketiga, rendahnya pemahaman dan adanya reduksi pemahaman itu tidak terlepas dari sumber informasi tentang ASEAN Community yang lebih dominan diperoleh dari informasi sekunder.

Kata-kata Kunci: ASEAN Community, MEA, Kota Malang

Pendahuluan

Tulisan ini mengkaji mengenai tantangan implementasi *ASEAN Community* yang dielaborasi dari hasil penelitian survei terkait pengetahuan dan pandangan mahasiswa perguruan tinggi di Kota Malang tentang *ASEAN Community*. Secara khusus, survei dilakukan kepada pengurus Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (Himahi) di Kota Malang. Dalam konteks ini, hanya ada

dua Program Studi Hubungan Internasional di Kota Malang, yaitu di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Universitas Brawijaya (UB). Karena itu, survei hanya dilakukan terhadap pengurus Himahi di dua universitas tersebut.

Sebagaimana dipahami bahwa per 1 Januari 2016, ASEAN memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya *ASEAN Community* dengan tiga pilarnya. Ketiga pilar

¹ Staf Pengajar Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), email nkhairurrijal@gmail.com.

tersebut, yaitu pilar Politik-Keamanan (*ASEAN Political-Security Community*), pilar Ekonomi (*ASEAN Economic Community*), dan pilar Sosial-Budaya (*ASEAN Socio-Cultural Community*).

ASEAN Community sejatinya merupakan pengejawantahan dalam mewujudkan Visi ASEAN 2020. Visi ASEAN 2020 adalah cita-cita ASEAN untuk mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, dan diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis dan diharapkan terwujud pada tahun 2020 (Direktorat Jenderal Kerja sama ASEAN, 2015). Visi tersebut telah disepakati dan ditetapkan di Kuala Lumpur pada 15 Desember 1997. Lebih lanjut, upaya untuk merealisasikan visi tersebut mendorong pembentukan *ASEAN Community* pada 2020 melalui kesepakatan Bali Concord II pada tahun 2003. Namun, pada KTT ASEAN ke-12 di Filipina tahun 2007, disepakati percepatan pemberlakuan *ASEAN Community* dari tahun 2020 ke tahun 2015.

Uraian di atas setidaknya menunjukkan bahwa sesungguhnya gagasan dan kesepakatan pembentukan *ASEAN Community* telah cukup lama. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa ada rentang waktu yang cukup panjang bagi negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, untuk mewujudkan kesiapan dalam memasuki era *ASEAN Community*. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai hal dalam upaya menyongsong

ASEAN Community, termasuk membuat payung hukum dan beragam upaya sosialisasi.

Namun demikian, meskipun telah melakukan sejumlah persiapan menuju *ASEAN Community*, hasil survei Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada paruh tahun 2013 mengenai pemahaman masyarakat Indonesia tentang konsep *ASEAN Community* menunjukkan tingkat pemahaman yang masih rendah (Syelvia, 2013). Selain itu, hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada akhir 2015, yakni menjelang pemberlakuan *ASEAN Community*, juga menunjukkan bahwa kesadaran dan tingkat pemahaman masyarakat Indonesia mengenai *ASEAN Community* ternyata masih rendah (Khanisa, 2016). Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat berdasarkan dua survei tersebut di atas menjadi dasar dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengetahuan dan pandangan mahasiswa tentang *ASEAN Community* setelah satu tahun diberlakukan.

Penelitian Terdahulu

Ada beberapa publikasi terkait hasil survei atau penelitian yang berkenaan dengan pandangan masyarakat tentang *ASEAN Community*. Pertama, beberapa survei secara spesifik fokus pada salah satu pilar dari *ASEAN Community*. Seperti yang dilakukan oleh Kamarulnizam Abdullah dan Guido Benny (2013) mengenai survei opini publik masyarakat di Indonesia, Malaysia, dan

Singapura terkait pembentukan *ASEAN Political-Security Community* (APSC). Selain itu, penelitian survei Guido Benny (2015) terhadap profesional muda di tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Penelitian ini mengkaji mengenai kesadaran dan persepsi profesional muda tentang *ASEAN Economic Community* (AEC).

Selanjutnya, survei opini publik terkait pembentukan AEC yang dilakukan oleh Guido Benny, Tham Siew Yean, dan Rashila Ramli (2015). Survei dilakukan di 11 kota-kota besar dari tiga negara yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ketiga penelitian terdahulu di atas secara spesifik hanya mengkaji satu pilar dari *ASEAN Community*. Meski demikian, ketiganya memberikan potret atau gambaran penting tentang pengetahuan dan pemahaman publik di beberapa negara terkait salah satu pilar *ASEAN Community*.

Kedua, penelitian yang secara umum mengkaji *ASEAN Community*. Antara lain, dilakukan oleh Kamarulnizam Abdullah, Guido Benny, dan Mohamed Anuar Omar Din (2010). Penelitian ini mengkaji terkait bagaimana pemahaman masyarakat tentang ide dan konseptualisasi *ASEAN Community*. Peneliti membandingkan bagaimana pemahaman dan respons masyarakat Malaysia dan Indonesia terkait ide dan konsep *ASEAN Community*.

Ketiga, survei lainnya secara khusus menyoal masyarakat Indonesia untuk mengetahui persepsi dan sikap masyarakat

terhadap *ASEAN Community*. Antara lain, dilakukan oleh Guido Benny dan Abdullah Kamarulnizam (2011). Survei ini dilakukan di lima kota di Indonesia, yakni Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan Pontianak. Survei lain yang dilakukan oleh Guido Benny (2012) adalah terkait persepsi publik di Indonesia terhadap rintangan dalam mewujudkan *ASEAN Community*. Survei ini dilakukan di lima kota, yakni Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar dan Pontianak.

Selanjutnya, hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada akhir 2015, yakni menjelang pemberlakuan *ASEAN Community*, menunjukkan bahwa kesadaran dan tingkat pemahaman masyarakat Indonesia mengenai *ASEAN Community* ternyata masih rendah (Khanisa, 2016). Survei tersebut dilakukan di 16 kota dengan delapan daerah utama, yaitu Medan, Bekasi, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Manado dan Denpasar; serta delapan daerah pembanding yakni Jambi, Indramayu, Majalengka, Grobogan, Palangkaraya, Bangkalan, Mamuju, dan Kupang.

Konsepsi *ASEAN Community*

Sebagaimana telah disinggung di awal, *ASEAN Community* merupakan perkembangan terkini dari kerja sama dan integrasi regional negara-negara anggota ASEAN dalam mewujudkan Visi ASEAN 2020. Pembentukan *ASEAN Community* disepakati pada Konferensi Tingkat Tinggi

(KTT) ASEAN ke-9 di Bali pada 7 Oktober 2003. Kesepakatan tersebut dikenal dengan Bali Concord II. Dalam perkembangannya, menyadari bahwa persaingan ekonomi yang semakin tajam di mana ketergantungan negara-negara anggota ASEAN dengan kawasan lain di dunia yang semakin meningkat serta dalam rangka memperkecil kesenjangan pertumbuhan ekonomi kemudian menjadi alasan untuk melakukan percepatan pembentukan *ASEAN Community* menjadi tahun 2015 (Luhulima, dkk., 2008). Percepatan *ASEAN Community* 2020 menjadi 2015 tersebut ditetapkan pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina pada 13 Januari 2007 dan telah dibelakukan sejak 31 Desember 2015.

Lebih lanjut, ketetapan untuk membentuk *ASEAN Community* dipertegas dengan disepakatinya Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) pada KTT ke-13 ASEAN di Singapura pada 20 November 2007. Piagam ASEAN tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 15 Desember 2008 setelah semua negara anggota ASEAN meratifikasinya. Dalam konteks Indonesia, pemberlakuan Piagam ASEAN ini disahkan melalui Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Direktorat Jenderal Kerja sama ASEAN, 2015). Piagam ASEAN menjadi dasar dari perwujudan integrasi ASEAN dalam wadah yang selanjutnya dikenal dengan *ASEAN Community*.

ASEAN Community merupakan upaya

organisasi regional ASEAN mengintegrasikan diri mereka dalam visi dan misi yang sama untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara yang stabil, aman, maju, dan sejahtera melalui tiga pilarnya, yakni Politik-Keamanan, Ekonomi, dan Sosial-Budaya. Untuk mencapai terbentuknya *ASEAN Community*, telah ditetapkan Cetak Biru (*Blue Print*) dari ketiga pilar dalam *ASEAN Community*. Cetak Biru pilar Ekonomi disahkan pada 2007 dan Cetak Biru pilar Politik-Keamanan ASEAN dan Cetak Biru pilar Sosial-Budaya ASEAN disahkan pada 2009.

Secara umum, yang ingin dicapai ASEAN melalui ketiga pilar tersebut adalah, pertama, pilar politik-keamanan bertujuan mempercepat kerja sama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian dengan pendekatan keamanan komprehensif dan menyelesaikan masalah di antara negara-negara anggotanya bukan dengan cara kekerasan atau dengan ancaman penggunaan kekerasan melainkan dengan cara-cara yang *soft* melalui diplomasi atau kerja sama (ASEAN, 2009a). Dalam hal ini, Indonesia adalah pihak yang memprakarsai ide terwujudnya pilar politik-keamanan.

Kedua, dalam konteks komunitas ekonomi tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan kawasan ASEAN lebih stabil, sejahtera dan sangat kompetitif, memungkinkan bebasnya lalu lintas barang, jasa, investasi dan aliran modal serta adanya kesetaraan pembangunan ekonomi dan

pengurangan kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi (ASEAN, 2008). Ketiga, dalam konteks sosial-budaya, ASEAN akan membangun masyarakat yang peduli dan empati tanpa memandang sekat-sekat perbedaan kultural (*building community of caring societies*). Integrasi ASEAN berpusat pada masyarakat (*people-centered*) serta memperkuat kesadaran, solidaritas, kemitraan, dan rasa kebersamaan masyarakat (*we feeling*) terhadap ASEAN (ASEAN, 2009b).

Konsepsi *ASEAN Community* ini selanjutnya sebagai pedoman untuk melihat apa saja yang diketahui oleh responden tentang *ASEAN Community*. Pengetahuan dan pemahaman responden, dalam hal ini pengurus Himahi, tentang *ASEAN Community* selanjutnya dielaborasi untuk mendiskusikan tantangan implementasi *ASEAN Community*.

Metode Penelitian

Ditinjau dari tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan keadaan gejala sosial apa adanya, tanpa menguji teori atau membuktikan hipotesis. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dari lapangan (*field research*), dapat berupa data statistik maupun data non-statistik. Selain itu, untuk mendukung data primer digunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.

Penelitian ini dilaksanakan antara pekan terakhir Maret sampai pekan pertama Mei 2017. Penelitian berlokasi di perguruan tinggi Kota Malang yang memiliki Program Studi Hubungan Internasional, yakni Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Brawijaya. Adapun sampel penelitian, yang selanjutnya disebut responden, secara keseluruhan berjumlah 60 orang yang merupakan pengurus Himahi di UMM dan UB. Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 55 persen perempuan dan 45 persen laki-laki. Teknik penentuan sampel menggunakan sampling acak sederhana (*simple random sampling*), di mana sampel dipilih secara acak sehingga semua populasi memiliki probabilitas (kemungkinan) untuk terpilih (Silalahi, 2015).

Pengumpulan data yang dilakukan merupakan wawancara yang terstruktur (*structured interview*) atau wawancara survei dan atau pengisian angket. Sementara itu, teknik analisis data secara umum dilaksanakan melalui tiga tahap (Bungin, 2005; Sumarni dan Wahyuni, 2006; Nazir, 2009), yaitu pemeriksaan data (*editing*), pembuatan kode (*coding*), dan tabulasi dengan menyajikan data dalam bentuk yang lebih sederhana berupa tabel, diagram, grafik, atau lainnya.

Hasil Penelitian

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, hasil penelitian (survei) dikelompokkan ke dalam tiga jenis. Pertama, pemahaman dasar terkait kapan *ASEAN Community* diberlakukan dan berapa jumlah

pilar yang dimiliki. Kedua, mencoba menggali respons individu atas *ASEAN Community* serta bagaimana pendapat dan tanggapan yang dimiliki responden mengenai *ASEAN Community* yang telah berlangsung selama setahun ketika penelitian ini dilakukan. Ketiga, terkait sumber-sumber informasi yang memberikan pengetahuan tentang *ASEAN Community* kepada responden.

Dalam konteks pemahaman dasar dan umum, peneliti menanyakan mengenai kapan *ASEAN Community* mulai diberlakukan. Hasilnya menunjukkan bahwa 96,7 persen atau 58 responden menyatakan mengetahui waktu pertama kali *ASEAN Community* diberlakukan, sisanya 3,3 persen tidak tahu. Sebanyak 57 responden yang mengaku tahu menyebutkan dengan benar bahwa *ASEAN Community* diberlakukan sejak 31 Desember 2015. Namun, 1 orang responden menyebutkan tanggal 30 Desember 2015 sebagai awal mula pemberlakuan *ASEAN Community*.

Adapun jawaban terkait jumlah pilar dari *ASEAN Community* secara umum tepat. Ketika ditanya mengenai berapa pilar dari *ASEAN Community*, hanya 3,3 persen yang tidak mengetahui jumlah pilar *ASEAN Community*. Sementara sebanyak 96,7 persen menjawab dengan benar bahwa *ASEAN Community* terdiri dari tiga pilar. Sebagaimana diketahui ketiga pilar tersebut adalah pilar Politik-Keamanan (*ASEAN Political-Security Community*), pilar Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*), dan

pilar Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*).

Meski mayoritas responden dapat menyebutkan dengan baik ketiga pilar yang dimaksud, namun beberapa di antaranya keliru dalam hal penyebutan, misalnya hanya menyebut “Komunitas Keamanan” atau penamaan terbalik menjadi “Komunitas Keamanan-Politik” untuk pilar Politik-Keamanan. Contoh kesalahan lain adalah penyebutan pilar Sosial-Politik, padahal seharusnya pilar Sosial-Budaya serta Politik-Keamanan. Selain itu, kesalahan lain adalah satu orang yang salah dalam merinci ketiga pilar *ASEAN Community*, yakni memasukkan pilar Agrikultural selain pilar Politik-Keamanan dan Sosial-Budaya. Padahal dalam *ASEAN Community* tidak ada pilar Agrikultural, melainkan pilar Ekonomi.

Pertanyaan selanjutnya adalah terkait pandangan dan tanggapan responden mengenai *ASEAN Community*. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui sikap responden terhadap *ASEAN Community*. Selanjutnya, responden diminta untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya tentang *ASEAN Community*. Jawaban dari pertanyaan ini dapat dibagi ke dalam tiga kategori sikap, yakni optimis, pesimis, dan netral.

Responden yang cenderung optimis memandang *ASEAN Community* secara positif, bahwa *ASEAN Community* akan menguntungkan dan menjadi peluang untuk mengembangkan kohesivitas kawasan.

Responden yang cenderung pesimis memandang *ASEAN Community* sebagai cita-cita yang baik, namun dalam perkembangannya penerapannya dipandang belum siap. Dalam konteks Indonesia, responden yang pesimis memandang *ASEAN Community* akan memberikan kerugian bagi Indonesia karena rendahnya daya saing. Selain itu, jalan tengah dari kedua sikap di atas adalah netral, dengan memberikan jawaban normatif atau bahkan tidak menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.

Berdasarkan pembagian di atas, sebanyak 60 persen responden memiliki pandangan dan pendapat yang cenderung optimis tentang *ASEAN Community*. Pendapat optimis tersebut antara lain ditandai dengan jawaban bahwa *ASEAN Community* akan mengintegrasikan negara-negara di Asia Tenggara, yang selanjutnya dapat memberikan manfaat kepada masing-masing negara ASEAN. Manfaat tersebut karena negara-negara ASEAN dapat menjalin berbagai kerja sama di berbagai bidang, khususnya politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Salah satu responden berpendapat bahwa *ASEAN Community* “adalah sebuah tantangan bagi kami, kaum yang berpendidikan untuk mensosialisasikan ASEAN dan mengenalkan peluang-peluang dan tantangan *ASEAN Community* bagi masyarakat luas.”

Sementara itu, 30 persen responden lainnya cenderung memandang pesimis adanya *ASEAN Community*. Beberapa jawaban,

antara lain, memandang bahwa penerapan *ASEAN Community* masih belum siap. Ketidaksiapan tersebut dinilai karena kesiapan beberapa negara masih kurang, terutama negara-negara seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (yang biasa disingkat CLMV).

Menurut salah satu responden, “Jika tidak diimbangi dengan kesiapan yang maksimal, maka *ASEAN Community* tidak memberikan keuntungan bagi kemajuan negara.” Selain itu, dalam tataran masyarakat, masyarakat ASEAN, khususnya Indonesia, dipandang belum siap karena cita-cita ASEAN ini belum tersosialisasi secara maksimal. Padahal *ASEAN Community* berorientasi pada *people centered*, namun karena minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, *ASEAN Community* dinilai masih sangat elitis. “Bagaimana mau menjalankan apabila belum mengenal. Karena itu, perlu untuk lebih mematangkan persiapan *ASEAN Community* kembali agar tercapai tujuan yang diinginkan.”

Selain itu, pertanyaan terakhir yang diajukan adalah mengenai sumber informasi terkait dari mana saja responden memperoleh informasi dan pengetahuan tentang *ASEAN Community*. Meskipun tidak berhubungan langsung dengan pemahaman responden terkait *ASEAN Community*, namun pertanyaan ini dipandang penting untuk mengetahui berbagai referensi responden terkait sumber-sumber informasi yang membentuk pengetahuan dan pemahaman

mereka tentang *ASEAN Community*. Hasilnya ditunjukkan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1. Sumber Informasi tentang *ASEAN Community*

| Sumber Informasi | Jumlah Responden | Persentase (%) |
|----------------------------|------------------|----------------|
| Televisi | 17 | 28,3 |
| Internet | 54 | 90 |
| Media sosial | 21 | 35 |
| Surat kabar, majalah, buku | 19 | 31,7 |
| Dosen | 41 | 68,3 |
| Teman | 26 | 43,3 |
| Seminar, sosialisasi | 24 | 40 |
| Lainnya | 2 | 3,3 |

Catatan: Jawaban responden bisa lebih dari satu pilihan

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (90 persen) mengetahui tentang *ASEAN Community* dari sumber internet. Sumber internet yang dimaksud adalah berbagai *website*, *blog*, serta portal berita. Selanjutnya, sumber informasi dari dosen menempati peringkat kedua dengan persentase 68,3 persen dari total responden. Sementara sumber informasi yang berasal dari teman memiliki persentase 43,3 persen dari keseluruhan responden. Teman yang dimaksud adalah baik teman sepergaulan, teman ketika responden berkumpul mengerjakan tugas yang terkait dengan *ASEAN Community*, maupun teman yang merupakan pengurus Himahi saat responden pertama kali memasuki dunia kampus. Adapun sumber informasi yang berasal dari keikutsertaan dalam seminar atau

sosialisasi tentang *ASEAN Community* memiliki persentase sebesar 40 persen.

Selain empat sumber informasi di atas, informasi tentang *ASEAN Community* yang diperoleh dengan membaca surat kabar, majalah, atau buku diakui oleh 19 orang responden atau 31,7 persen. Jumlah ini di bawah dari persentase responden yang mengaku memperoleh informasi dari berbagai media sosial, yakni dengan persentase 35 persen responden. Sementara itu, hanya 28,3 persen atau 17 orang responden yang menyatakan bahwa informasi tentang *ASEAN Community* diperoleh dari menonton televisi.

Analisis dan Pembahasan

Hasil penelitian yang diuraikan di atas memberikan gambaran tentang potret

pengetahuan pengurus Himahi UMM dan UB tentang *ASEAN Community*.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut ada beberapa hal yang penting untuk dibahas. Pertama, terkait pengetahuan dasar tentang waktu pemberlakuan dan jumlah pilar dari *ASEAN Community*, mayoritas responden mengetahui dan dapat menjawab dengan benar, dibuktikan dengan persentase sebesar 96,7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan responden terhadap informasi dasar ini cukup baik, meskipun masih terdapat setidaknya tiga responden yang salah dalam merinci tiga pilar *ASEAN Community*.

Akan tetapi, ketika 96,7 persen atau 58 orang responden tersebut ditanya terkait karakteristik/tujuan umum dari masing-masing pilar *ASEAN Community*, tidak ada responden yang dapat menjawab dengan benar. Hanya ada satu responden yang mampu memberikan penjabaran tentang karakteristik pilar Politik-Keamanan dan pilar Ekonomi, meskipun penjabaran tersebut pun tidak sepenuhnya sesuai. Artinya, responden hanya mengetahui informasi umum dan dasar tentang *ASEAN Community*, sementara pengetahuan lanjutan dan pemahaman mendalam yang dimiliki responden tentang masing-masing pilar sangat minim.

Padahal, menurut peneliti, pengetahuan lanjutan dan pemahaman mendalam tentang substansi ketiga pilar *ASEAN Community* tersebut menjadi penting, terutama lagi bagi penstudi Hubungan Internasional. Apalagi, di

dua perguruan tinggi tersebut (UMM dan UB) memiliki mata kuliah yang fokus pada kajian kawasan Asia Tenggara. Dalam kajian kawasan Asia Tenggara, di UMM disebut HI Kawasan Asia Tenggara sementara di UB disebut Studi Kawasan Asia Tenggara, pembahasan tentang *ASEAN Community* adalah bagian integral untuk dibahas.

Selain itu, pemerintah melalui instansi terkait dan berbagai pihak gencar melakukan sosialisasi tentang *ASEAN Community* sejak beberapa tahun terakhir. Namun, temuan penelitian di atas setidaknya menunjukkan bahwa sosialisasi tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Apalagi dalam berbagai sosialisasi ataupun seminar, termasuk pemaparan materi dari dosen, *ASEAN Community* hanya dibahas secara garis besar tanpa eksplorasi secara mendalam dan mendetail.

Dalam konteks ini, rendahnya pemahaman tentang *ASEAN Community* yang dimiliki responden dalam penelitian ini menjadi tantangan dalam implementasi *ASEAN Community* lebih lanjut. Disebut tantangan karena hal ini mengindikasikan bahwa ide dan konsep *ASEAN Community* masih belum memasyarakat secara luas, bahkan di kalangan mahasiswa yang seharusnya melek terkait hal tersebut. Pengetahuan dan pemahaman tentang *ASEAN Community* masih sebatas informasi umum seperti waktu berlakunya serta jumlah pilar. Namun, penjabaran lebih lanjut tentang

penjelasan dari masing-masing pilar minim diketahui dan dipahami.

Lebih lanjut, tantangan bagi implementasi *ASEAN Community* lainnya adalah terdapat reduksi terhadap pemahaman tentang *ASEAN Community*. Responden dalam penelitian ini secara khusus, dan masyarakat luas secara umum, lebih familiar dengan istilah “MEA” (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Begitu pula dalam sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan, termasuk melalui iklan layanan masyarakat, MEA lebih banyak dibahas dan diperbincangkan ketika berbicara tentang *ASEAN Community*. Sehingga, berdasarkan temuan penelitian ini, terjadi reduksi terhadap *ASEAN Community* menjadi sebatas MEA. Hal tersebut tidak salah, namun juga tidak sepenuhnya benar. Sebab, MEA hanyalah satu bagian atau salah satu pilar dari *ASEAN Community*, selain pilar politik-keamanan dan pilar sosial-budaya.

Respons dan pendapat responden terhadap *ASEAN Community* mempertegas asumsi di atas, bahwa terjadi reduksi atas *ASEAN Community*. Sebagian besar responden, baik yang optimis maupun pesimis dalam memandang *ASEAN Community*, memberikan pendapat yang cenderung mengarah hanya pada konteks pilar Ekonomi. Beberapa jawaban yang dimaksud antara lain seperti, “Saya setuju, karena ini merupakan tantangan bagi masyarakat Indonesia agar tidak terpaku pada zona nyaman. Melalui MEA, perlu ada upaya dari masyarakat

Indonesia untuk meningkatkan kualitas dirinya.”

Jawaban lain misalnya, “Saya sepakat dengan adanya *ASEAN Community* karena membuka liberalisasi ekonomi serta pengintegrasian negara di kawasan Asia Tenggara.” Pendapat lain contohnya, “Adanya *ASEAN Community* dapat menstimulus negara-negara anggota untuk mengembangkan dunia usaha sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional.” Atau, pendapat responden yang pesimis, “Tidak setuju, karena mental bersaing orang Indonesia kurang dan orang Indonesia masih kurang mencintai produk Indonesia. Nanti Indonesia malah jadi pasar.”

Contoh jawaban responden di atas menunjukkan bahwa responden memahami *ASEAN Community* secara parsial, yakni terkait dimensi ekonomi. Istilah “liberalisasi ekonomi”, “dunia usaha”, “pembangunan ekonomi”, “produk”, dan ‘pasar” adalah beberapa kata yang mengindikasikan pemahaman parsial tersebut. Padahal, sebagaimana telah dipaparkan di atas, dimensi ekonomi, politik-keamanan, dan sosial-budaya adalah satu bagian integral, saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain dalam pembentukan *One Vision, One Identity, One Community* yang menjadi *tagline* ASEAN. Karena itu, pemahaman yang parsial terkait *ASEAN Community* sebatas pada dimensi ekonomi ini menjadi tantangan penting dalam memasyarakatkan *ASEAN Community*.

Namun, di sisi lain, reduksi pemahaman dari *ASEAN Community* menjadi sebatas dimensi ekonomi kiranya dapat dipahami sebagai implikasi kebijakan *top-down* dari pemerintah. Maksudnya, selama ini melalui iklan layanan masyarakat ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah lebih banyak berbicara dalam konteks ekonomi (MEA). Hal itu dapat pula dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menyongsong era *ASEAN Community*. Tampak bahwa porsi perhatian terhadap pilar ekonomi terkesan lebih dominan dibanding dua pilar lainnya.

Hal itu dapat dilihat, misalnya di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Selain itu, pemerintah juga melakukan *nation branding* melalui Program Aku Cinta Indonesia (ACI), penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta reformasi kelembagaan dalam rangka menghadapi MEA.

Tidak hanya itu, tahun 2014, pemerintah juga menerbitkan Inpres No.6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Keppres No, 37 tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi

ASEAN yang ditetapkan pada tanggal 1 September 2014 (AEC Center, 2016). Selanjutnya, pembentukan *AEC Center* oleh Kementerian Perdagangan pada September 2015 semakin menguatkan betapa pentingnya prioritas dan perhatian pemerintah terhadap sektor ekonomi dalam *ASEAN Community*.

Beberapa kebijakan di atas tentu merupakan upaya yang baik untuk meningkatkan daya saing nasional. Sebab, menurut *Global Competitiveness Index* yang dikeluarkan *World Economic Forum* (WEF), daya saing Indonesia 2015-2016 menempati urutan 34 di bawah Singapura (2), Malaysia (20) dan Thailand (31). Sementara indikator *Ease of Doing Business* Indonesia 2016 pada tingkat ASEAN, masih kalah dengan Filipina (103), Brunei (84), Thailand (49), Malaysia (18) dan Singapura(1). Karena itu, menurut pemerintah, indikator daya saing Indonesia masih perlu banyak diperbaiki (AEC Center, 2016).

Namun, dalam konteks yang lebih luas, masyarakat Indonesia sebagai masyarakat ASEAN juga menjadi perlu untuk memahami aspek politik-keamanan, dan terutama aspek sosial-budaya sebagai pilar *ASEAN Community*. Pemahaman komprehensif ketiga pilar tersebut menjadi penting dalam rangka memasyarakatkan ASEAN dan membangun kesadaran masyarakat untuk ber-ASEAN (*ASEAN we feeling*). Apalagi, dibentuknya *ASEAN Community* didorong oleh keinginan

ASEAN untuk melakukan transformasi organisasi dari yang selama ini *state centered* ke lebih berpusat dan berorientasi pada masyarakat (*people centered and people oriented*). Karena itu, tantangan ke depan adalah memasyarakatkan *ASEAN Community* secara utuh dan menyeluruh agar masyarakat, terutama *stakeholders*, tidak memahami *ASEAN Community* secara parsial.

Selanjutnya, terkait sumber informasi tentang *ASEAN Community*, hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase surat kabar, majalah, dan buku tiga kali lipat lebih rendah dibanding persentase internet, serta dua kali lebih rendah dibanding dari dosen. Hal ini mengindikasikan minimnya pengetahuan tentang *ASEAN Community* yang diperoleh dari sumber tertulis yang berbentuk fisik (cetak). Responden lebih banyak memperoleh informasi dari *website*, *blog* atau portal berita terutama saat yang bersangkutan mengerjakan tugas-tugas kuliah yang memiliki relevansi dengan pembahasan ASEAN. Selain itu, peran dosen dalam mentransfer pengetahuan dapat dikatakan cukup besar ditandai dengan persentase 68,3 persen. Artinya, informasi yang diperoleh tidak secara langsung, melainkan melalui sumber kedua atau sumber sekunder.

Hal ini, menurut peneliti, menjadi tantangan berikutnya dalam memasyarakatkan *ASEAN Community*, terutama di kalangan mahasiswa. Sejatinya, Sekretariat ASEAN dan Ditjen Kerja Sama ASEAN memiliki banyak

bahan publikasi untuk memasyarakatkan *ASEAN Community*, baik berupa buku, brosur, *leaflet*, ataupun majalah Masyarakat ASEAN. Namun, rendahnya referensi informasi dari sumber primer (dalam hal ini publikasi resmi dari ASEAN dan pemerintah) perlu menjadi bahan evaluasi. Apalagi, mahasiswa, terutama lagi mahasiswa Hubungan Internasional, dituntut untuk melek informasi tentang hal tersebut. Karena itu, menjadi tugas pihak terkait, secara khusus Pusat Studi ASEAN (PSA) yang telah ada di UMM dan UB sebagai representasi Ditjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri di perguruan tinggi, untuk berperan aktif dalam menyebarkan informasi tentang *ASEAN Community* dalam rangka memberikan pemahaman dan membangun kesadaran masyarakat untuk ber-*ASEAN Community*.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, setidaknya ada tiga tantangan dalam implementasi *ASEAN Community*. Pertama, pemahaman masyarakat, dalam konteks ini mahasiswa, terutama terkait karakteristik/tujuan pilar-pilar *ASEAN Community* masih rendah. Sehingga, menjadi sulit untuk menuntut kontribusi positif mereka dalam rangka menyukseskan *ASEAN Community* jika tidak dibarengi dengan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang *ASEAN Community* itu sendiri.

Kedua, minimnya pemahaman mendalam tersebut di atas mengakibatkan

adanya pemahaman parsial terkait *ASEAN Community*. *ASEAN Community* lebih identik dan familiar dipahami sebatas pada dimensi ekonomi. Reduksi pengetahuan dan pemahaman itu ditandai dengan pandangan responden terhadap *ASEAN Community* yang lebih cenderung pada jawaban yang berkaitan dengan pilar ekonomi ASEAN (MEA).

Ketiga, dua hal di atas dapat terjadi karena referensi informasi yang dimiliki masyarakat, dalam hal ini mahasiswa yang menjadi responden, merupakan informasi sekunder atau tidak secara langsung dari sumber-sumber tertulis (cetak) tentang *ASEAN Community* yang diterbitkan Sekretariat ASEAN dan pemerintah. Hal ini sekaligus mengindikasikan setidaknya dua hal. Pertama, karena rendahnya minat baca masyarakat, dan atau kedua, belum terpublikasikannya secara maksimal bahan-bahan publikasi dan sosialisasi yang selama ini diterbitkan oleh Sekretariat ASEAN dan pemerintah melalui instansi terkait.

Ketiga hal di atas kiranya menjadi tantangan penting dalam implementasi *ASEAN Community* serta upaya membangun kesadaran ber-ASEAN masyarakat (*ASEAN We Feeling*). Untuk itu, perlu penelitian lebih lanjut mengenai upaya yang dilakukan oleh Pusat Studi ASEAN yang ada di Kota Malang (di UMM dan UB) dalam memperkenalkan, mempromosikan, dan mensosialisasikan *ASEAN Community* kepada masyarakat luas, baik pelajar dan mahasiswa, pengusaha dan

pelaku bisnis, aparat sipil negara, dan masyarakat umum.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) UMM yang telah mendanai penelitian ini. Selain itu, terima kasih kepada Nadya Fatma Alantika dan Natasya Ichi Tania, mahasiswa Prodi Ilmu Hubungan Internasional UMM, yang telah berkontribusi dalam pengumpulan dan pengolahan data penelitian.

Daftar Pustaka

Buku

- ASEAN. 2008. *ASEAN Economic Community Blueprint*. Jakarta: ASEAN Secretariat
- ASEAN. 2009a. *ASEAN Political-Security Community Blueprint*. Jakarta: ASEAN Secretariat
- ASEAN. 2009b. *ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint*. Jakarta: ASEAN Secretariat
- Direktorat Jenderal Kerja sama ASEAN. 2015. *ASEAN Selayang Pandang, Edisi Ke-21, Tahun 2015*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja sama ASEAN
- Direktorat Jenderal Kerja sama ASEAN. 2016. *Ayo Kenali ASEAN*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja sama ASEAN
- Luhulima, CPF. dkk. 2008. *Masyarakat Asia Tenggara Menuju ASEAN Community 2015*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan P2P LIPI
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Cet. Ke-7. Bandung: Ghalia Indonesia
- Silalahi, Ulber. 2015. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: Refika Aditama
- Sumarni, Murti dan Salamah Wahyuni. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset

Artikel Jurnal

- Abdullah, Kamarulnizam., Guido Benny, dan Mohamed Anuar Omar Din. 2010. "The Understanding of the Idealization and Conceptualization of ASEAN Community: Comparative Study between Malaysia and Indonesia", *Tamkang Journal of International Affairs*; 14卷2期 (2010/10/01):91-129
- Abdullah, Kamarulnizam dan Guido Benny. 2013. "Regional Public Opinion Towards the Formation of Political Security Community in Southeast Asia", *Asian Journal of Scientific Research*, February: 1-16
- Benny, Guido dan Abdullah Kamarulnizam. 2011. "Indonesian Perceptions and Attitudes toward the ASEAN Community", *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 30 (1): 46-51
- Benny, Guido. 2012. "Public Perception in Indonesia on the Obstacles for Establishing the ASEAN Community", *International Journal on Social Science Economic & Arts*, Vol. 2, No. 3: 30-37
- Benny, Guido. 2015. "Is the ASEAN Economic Community Relevant To Gen Y Professionals? A Comparative Study on Attitudes and Participation of Young Professionals in Malaysia, Indonesia, and Vietnam on ASEAN Economic Integration," *Asian Journal for Public Opinion Research*, Vol. 3 No.1 November: 40-62
- Benny, Guido., Tham Siew Yean, dan Rashila Ramli. 2015. "Public Opinion on the Formation of the ASEAN Economic Community: An Exploratory Study in Three ASEAN Countries", *IJAPS*, Vol. 11, No. 1, 85–114
- Khanisa. 2016. *Strategi Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Jurnal Penelitian Politik. Volume 13 No. 1 Juni 2016:105–118

Artikel Online

- LIPI. 2015. "Pemahaman terhadap MEA Masih Rendah," diakses dalam <http://lipi.go.id/berita/single/Pemahaman-terhadap-MEA-Masih-Rendah/10474> (diakses pada 17/10/2016)
- Syelvia, Yesi. 2013. "Pemahaman Masyarakat tentang *ASEAN Community* Masih Rendah," diakses dalam <http://international.sindonews.com/read/752223/40/pemahaman-masyarakat-tentang-komunitas-asean-masih-rendah-1371734723> (diakses pada 17/10/2016)
- AEC Center. 2015. "Persiapan Indonesia Menyambut AEC 2015," dalam <http://aeccenter.kemendag.go.id/tentang-aec-2015/persiapan-indonesia/> (diakses pada 08/08/2017)